

PENDAYAGUNAAN ARSIP DALAM MENDORONG PEMBANGUNAN EKONOMI KREATIF

Musliichah¹

Abstract

The Indonesian government uses creative economy strategic in the economic development of Indonesia. Creative economic development is done through intensification of information and creativity of ideas, and knowledge of human resources as a factor of production. Information is a critical asset in development. The success of development is influenced by various parties including the "informed observers". Archive as one source of information and archival institutions as one of the information service providers have an important role in development. Archives can be utilized through a variety of programs to build the creative economy.

Keywords: *creative economy, information, archives, cultural industries.*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kebijakan pembangunan bidang perekonomian Indonesia saat ini diarahkan pada konsep ekonomi kreatif. Hal ini didasarkan pada pengalaman kegagalan pembangunan perekonomian pada tahun-tahun sebelumnya serta tuntutan dan tantangan era saat ini. Kondisi bangsa Indonesia sangat kompleks permasalahannya sehingga diperlukan berbagai terobosan dan strategi dalam upaya penyelesaiannya. Kebijakan pemerintahan Joko Widodo dalam

menggunakan strategi ekonomi kreatif sebagai salah satu terobosan dalam mendorong pembangunan perekonomian di Indonesia tersiar dalam berbagai berita media massa.

Indra Tranggono dalam tulisannya berjudul “DIY dan Tantangan Ekonomi Kreatif” yang dimuat dalam kolom Opini SKH Kedaulatan Rakyat, 31 Desember 2014 menyebutkan bahwa pemerintah era Susilo Bambang Yudoyono (SBY) dan Jokowi (Joko Widodo) mengambil ekonomi kreatif sebagai jalan keluar dari kebuntuan pembangunan ekonomi Indonesia.

¹ *Arsiparis Arsip UGM*

Keseriusan pemerintahan Joko Widodo dalam mengembangkan ekonomi kreatif di Indonesia salah satunya diwujudkan dengan rencana membentuk suatu badan yang akan menangani secara serius ekonomi kreatif Indonesia, seperti yang diberitakan dalam financedetik.com berikut ini:

"Tadi saya ketemu Pak Menko Perekonomian (Sofyan Djalil) untuk memberikan masukan mengenai konsep untuk membangun atau mendirikan badan ekonomi kreatif," kata Mantan Kepala BKPM Mahendra Siregar, ditemui di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Kamis (20/11/2014). Mahendra mengatakan, inti dari badan ekonomi kreatif yang akan dibentuk tersebut untuk menunjukkan komitmen pemerintah memajukan ekonomi kreatif di Indonesia".

Permasalahan perekonomian menjadi isu yang sangat strategis karena faktor ini sangat mempengaruhi keberhasilan sektor pembangunan lainnya. Keberhasilan pembangunan perekonomian akan menjadi sumber daya pembangunan-pembangunan sektor lainnya

karena setiap program pembangunan membutuhkan sumber dana. Salah satu kebijakan pemerintah yang telah dimulai sejak era pemerintahan SBY adalah membangun pembangunan perekonomian dengan konsep pengembangan ekonomi kreatif. Saat ini pemerintahan Joko Widodo juga menggunakan konsep ekonomi kreatif sebagai strategi pembangunan perekonomian Indonesia. Salah satu unsur penting dalam implementasi dari konsep ekonomi kreatif adalah informasi. Ekonomi kreatif bertumpu pada sumber daya manusia (SDM), khususnya pada ide-ide kreatif dari SDM. (KR 31 Desember 2014).

Ide-ide kreatif tersebut dapat diproduksi/dihasilkan sebagai sumber daya untuk menggerakkan perekonomian jika ada *input*/sumber daya informasi bagi SDM. Informasi ini akan menjadi sumber inspirasi bagi SDM untuk melahirkan ide-ide kreatif. Oleh karena itu, sudah semestinya untuk menyukseskan program pemerintah yang menargetkan tahun 2015 sebagai waktu tercapainya

masyarakat informasi di Indonesia serta untuk menyiapkan masyarakat dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).

Terkait dengan kebijakan ekonomi kreatif dan menghadapi MEA, tahun 2015 telah dicanangkan sebagai tahun masyarakat informasi. Masyarakat informasi akan melahirkan masyarakat yang mandiri dan aktif dalam pembangunan. Salah satu langkah yang diambil pemerintah adalah menerbitkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang mengatur tentang hak-hak untuk mendapatkan informasi bagi publik. Selain itu, pemerintah juga menyadari bahwa mustahil mewujudkan masyarakat informasi tanpa memperhatikan sumber informasi. Salah satu sumber informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan adalah arsip.

Sehubungan dengan hal tersebut, pemerintah Indonesia pada tahun 2009 menerbitkan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan yang mengatur tentang cara

penciptaan, pemeliharaan, penggunaan, dan penyusutan arsip. Undang-undang di atas juga mengatur bentuk dan kewenangan organisasi kearsipan yang bertanggung jawab atas kegiatan kearsipan tersebut. Keberadaan UU KIP dan UU Kearsipan tidak serta merta menjamin terwujudnya masyarakat informasi dalam mendukung perekonomian. Diperlukan pemahaman tentang kedudukan dan fungsi informasi khususnya arsip dalam mendorong pembangunan khususnya ekonomi kreatif.

B. Rumusan Masalah

Sumber daya khususnya perangkat hukum yang mendukung terwujudnya masyarakat informasi dalam menyukseskan program ekonomi kreatif telah tersedia. Langkah selanjutnya yang perlu dikembangkan adalah mengkaji, merumuskan, dan melaksanakan berbagai strategi dengan mengacu produk-produk hukum yang ada sebagai aturannya. Tulisan ini mencoba mengurai hubungan dan peranan arsip sebagai sumber informasi dalam pelaksanaan kebijakan ekonomi kreatif.

Diharapkan tulisan ini dapat memberikan gambaran tentang hubungan arsip dan ekonomi kreatif serta peranan arsip dalam mendorong pelaksanaan ekonomi kreatif di Indonesia.

C. Kerangka Teori

Ekonomi kreatif menjadi strategi Pemerintah Indonesia dalam membangun keterpurukan perekonomian Indonesia. Menurut Wikipedia, ekonomi kreatif adalah:

“Sebuah konsep di era ekonomi baru yang mengintensifkan informasi dan kreativitas dengan mengandalkan ide dan pengetahuan dari sumber daya manusia sebagai faktor produksi yang utama. Konsep ini biasanya akan didukung dengan keberadaan industri kreatif yang menjadi pengejawantahannya. Seiring berjalannya waktu, perkembangan ekonomi sampai pada taraf ekonomi kreatif setelah beberapa waktu sebelumnya, dunia dihadapi dengan konsep ekonomi informasi yang mana informasi menjadi hal yang utama dalam pengembangan ekonomi.”

Pembangunan perekonomian dengan

konsep ekonomi kreatif memiliki karakteristik sebagai berikut:

1. Pelaksanaannya memerlukan kolaborasi berbagai aktor yang berperan dalam industri kreatif, yaitu cendekiawan (kaum intelektual), dunia usaha, dan pemerintah yang merupakan prasyarat mendasar
2. Pelaksanaannya berbasis pada ide atau gagasan
3. Pengembangan tidak terbatas dalam berbagai bidang usaha
4. Konsep yang dibangun bersifat relatif

(Wikipedia.com)

Definisi arsip menurut UU No. 43 Tahun 2009 adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Arsip

merupakan hasil rekaman seluruh kegiatan dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara yang mempunyai nilai guna dimensi kekinian dan masa lalu sebagai sumber kearifan lokal yang menjadi sumber informasi publik.

Informasi menurut UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan baik data, fakta, maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi elektronik maupun nonelektronik. Laksmi dkk. (2011:133) menjabarkan bahwa informasi terbentuk dimulai dari interpretasi sosial tentang realita, masyarakat menerima dan mendapatkan data dari lingkungan fisik. Melalui pengalaman, pengetahuan, kebiasaan, keyakinan, norma, dan nilai maka masyarakat menyeleksi dan menginterpretasi data tersebut. Lewat interaksi dengan orang lain maka

masyarakat memberikan makna pada data yang kemudian disebut sebagai informasi. Informasi menjadi komoditas utama dalam pembangunan perekonomian. Menurut Astrid Susanto (1977:6) informasi diposisikan sebagai komoditi, informasi dapat dikelola sebagai suatu komoditi.

II. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

A. Informasi sebagai Komoditi/ Sumber Daya

Informasi menjadi komoditas utama dalam pembangunan perekonomian. Informasi merupakan komoditi sehingga informasi dapat dikelola sebagai suatu komoditi atau modal. Supaya komoditi tersebut dapat didistribusikan secara luas maka perlu memperhatikan unsur pengadaannya (*acquisition*) dan distribusinya. Oleh karena itu, dunia informasi perlu dianalisa dalam rangka tugas dan hubungannya dengan masyarakat. Perlu dianalisa kembali masalah mengapa dan untuk apa masyarakat perlu diberi informasi, bagaimana peranan

informasi terhadap pembentukan bangsa dan masyarakat, bagaimana kebijakan negara telah membantu tercapainya tujuan pembangunan manusia seutuhnya, dan bagaimana sumbangan dan peranan dunia informasi dalam mencapai tujuan tersebut. (Astrid Susanto (1977:18) Disetiap negara terutama negara berkembang, modal informasi biasanya diadakan oleh pemerintah. Informasi sebagai modal utama ini perlu disebarakan melalui proses pendidikan dan penerangan, sehingga memungkinkan orang untuk mengembangkan diri dan membentuk modalnya sendiri. (Astrid Susanto, 1977:12-13)

Pembangunan sebuah negara termasuk pembangunan ekonomi dipengaruhi oleh keberadaan kelompok-kelompok dalam negara tersebut. Kelompok tersebut yaitu elite politik dan peranannya, elite administrator dan peranannya, elite cendekiawan dan peranannya, elite bisnis dan peranannya, elite militer dan peranannya, serta "*informed observers*" dan peranannya. *Informed observers* adalah

pengumpul, pengolah dan penyalur informasi, serta pembentuk pendapat umum (*public opinion*). Kelompok ini memiliki saham yang tidak kalah pentingnya dengan kelompok elite lainnya. Terlebih dunia sudah memasuki era teknologi informasi dimana informasi merupakan aset yang bersifat kritis bagi suatu bangsa. (Siagian, 2003:48-52)

Selain sebagai modal pembangunan, informasi juga menjadi penerang dan penuntun kehidupan. Seperti ungkapan berikut: "*Living in the information age can occasionally feel like being driven by someone with tunnel vision*". Berbekal informasi siapa saja dapat mencapai tujuannya dengan selamat. "*similarly, some of the people driving us all hard into the future on the back of new technologies appear to assume that if we all focus hard enough on information, than we will get where we want to go most directly.*" (John Seely and Paul Duguid, 2000:1)

Diprediksikan industri terpenting di masa depan adalah industri jasa informasi. Ini berarti bahwa keunggulan kompetitif organisasi di masa depan

akan ditentukan oleh pemilikan informasi. Informasi merupakan aset kritical yang sangat penting (*critical asset*) suatu organisasi. (Siagian, 2003:38-39) Perubahan dan perkembangan zaman yang menempatkan informasi sebagai suatu aset yang sangat penting telah mendorong pemerintah untuk mendayagunakan komoditas informasi dalam pembangunan perekonomian. Dalam rangka mendorong ekonomi kreatif perlu diperlukan adanya informasi. Untuk itu perlukan adanya lembaga informasi. Lembaga informasi menurut Laksmi dkk (2011:27) meliputi perpustakaan, arsip, museum, dan pusat informasi. Di Eropa keempat lembaga informasi ini telah berkembang sejak awal abad ke-19. Tujuan utama keberadaan lembaga informasi adalah menyediakan sekaligus memenuhi kebutuhan informasi masyarakat. Tugas lembaga informasi mulai dari mengumpulkan data kemudian mengolahnya menjadi informasi.

B. Pengelolaan Arsip untuk Mendorong Pembangunan Ekonomi Kreatif

Ekonomi kreatif telah lama dikembangkan di Indonesia dan mengalami pasang surut. Program tersebut dimulai tahun 2006 saat SBY menginstruksikan untuk membentuk Indonesian Design Power oleh Departemen Perdagangan guna membantu pengembangan ekonomi kreatif di Indonesia. Tahun 2007 dilakukan peluncuran Studi Pemetaan Kontribusi Industri Kreatif Indonesia 2007 dan tahun 2008, Cetak Biru Pengembangan Ekonomi Kreatif Indonesia 2025, dan Cetak Biru Pengembangan 14 Subsektor Industri Kreatif Indonesia. Inpres No. 6 Tahun 2009 mencanangkan tahun 2009 sebagai Tahun Indonesia Kreatif. Sejak digulirkannya ekonomi kreatif, telah tumbuh kekuatan ide yang fenomenal, dimana sebagian besar tenaga kerja kini berada pada sektor jasa atau menghasilkan produk abstrak, seperti data, software, berita, hiburan, periklanan, dan lain-lain. (Wikipedia.com)

Arsip sebagai salah satu sumber informasi memiliki keunggulan dibandingkan dengan sumber informasi lainnya karena arsip merupakan sumber informasi primer yang otentik. Di tengah ledakan informasi,

masyarakat harus bersikap cerdas dan bijaksana dalam memilih informasi karena informasi yang beredar belum tentu terjamin kualitasnya khususnya kebenaran dan keakuratannya. Arsip akan menjadi pusat rujukan informasi ditengah banyaknya informasi yang belum dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

Ketersediaan arsip yang baik dari segi kualitas dan kuantitas mutlak diperlukan. Oleh karena itu, diperlukan infrastruktur yang bertanggungjawab terhadap pengelolaan arsip. Infrastruktur tersebut berdasarkan UU No. 43 Tahun 2009 adalah organisasi kearsipan. Organisasi kearsipan meliputi unit kearsipan dan lembaga kearsipan. Unit kearsipan terdiri dari *central file* dan *records center* yang wajib dibentuk di seluruh organisasi khususnya organisasi publik. Organisasi publik adalah organisasi yang operasionalnya secara keseluruhan maupun sebagian menggunakan dana pemerintah. Lembaga kearsipan harus dibentuk di tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota, dan perguruan tinggi. Organisasi kearsipan mempunyai dua tugas utama terkait dengan informasi yaitu mengolah arsip sebagai sumber informasi dan menyajikan informasi kepada publik. Hal ihwal tentang

pengelolaan arsip diatur dalam UU No 43 Tahun 2009 tentang kearsipan sedangkan aturan tentang layanan informasi publik mengacu pada UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Pengelolaan informasi publik merupakan salah satu upaya untuk mengembangkan masyarakat informasi. Peranan utama lembaga kearsipan adalah menyediakan informasi publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan kepada masyarakat/publik. Penyediaan informasi publik harus mengedepankan kepuasan publik dengan memberikan layanan dengan cepat, tepat waktu, biaya ringan dan cara yang sederhana (pasal 2 UU No. 14/2008). Oleh karena itu organisasi kearsipan dituntut untuk mengembangkan berbagai sarana dan sistem pengelolaan arsip untuk dapat memberikan layanan informasi sesuai tuntutan UU No. 14 tahun 2008.

Arsip sebagai sumber informasi publik yang dikelola oleh organisasi kearsipan di setiap organisasi publik dapat didayagunakan dan menjadi komoditas/sumber daya ekonomi. Manfaat informasi publik dalam ekonomi antara lain:

1. Ketersediaan informasi publik terkait kebijakan-

kebijakan badan publik akan memberikan informasi, pengetahuan, dan pemahaman bagi publik yang akhirnya akan menjadi dasar dalam menjalankan bisnisnya.

2. Ketersediaan informasi publik terkait laporan kinerja badan publik akan memberikan informasi, pengetahuan, dan pemahaman bagi publik tentang gambaran kondisi riil lingkungannya sehingga publik dapat membuat prediksi tentang peluang dan tantangan yang akan dihadapinya.
3. Ketersediaan informasi publik terkait perencanaan program dan keuangan badan publik akan memberikan informasi, pengetahuan, dan pemahaman bagi publik tentang gambaran kondisi lingkungannya yang akan terjadi sehingga publik dapat mengambil langkah-langkah penyesuaian dan mengambil peluang-peluang yang ada.
4. Ketersediaan informasi publik tentang prosedur kerja pegawai badan publik yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat akan memberikan informasi, pengetahuan, dan pemahaman bagi publik yang akan menjadi dasar bagi

masyarakat dalam mengatur sistem/prosedur usaha yang akan dijalankannya.

Terkait kebutuhan informasi publik yang diperlukan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif yang dikembangkan oleh masyarakat, setiap badan publik menurut pasal 11 UU No. 14 Tahun 2008 wajib menyediakan informasi bagi publik setiap saat yang meliputi:

1. Daftar seluruh informasi publik yang berada di bawah penguasaannya (tidak termasuk informasi yang dikecualikan);
2. Hasil keputusan badan publik dan pertimbangannya;
3. Seluruh kebijakan yang ada berikut dokumen pendukungnya;
4. Rencana kerja proyek termasuk didalamnya perkiraan pengeluaran tahunan badan publik;
5. Perjanjian badan publik dengan pihak ketiga;
6. Informasi dan kebijakan yang disampaikan pejabat publik dalam pertemuan terbuka/umum;
7. Prosedur kerja pegawai badan publik yang

berkaitan dengan pelayanan masyarakat; dan

8. Laporan mengenai pelayanan akses informasi publik sebagaimana diatur dalam UU No. 14 Tahun 2008.

Jenis informasi di atas sebagian besar bersumber dari arsip dinamis yang dikelola di central file dan atau *records center*. Selain arsip dinamis, arsip statis juga dapat didayagunakan dalam mendorong pengembangan ekonomi kreatif. Bentuk-bentuk ekonomi kreatif yang dapat dikembangkan adalah industri kreatif (industri budaya). Industri budaya adalah industri yang berasal dari pemanfaatan kreativitas, keterampilan dan bakat individu untuk menciptakan kesejahteraan dan lapangan pekerjaan. Ekonomi kreatif meliputi periklanan, arsitektur, seni, kerajinan, desain, *fashion*, film (animasi) musik, seni pertunjukan, penerbitan, penelitian dan pengembangan, perangkat lunak, mainan dan permainan, televisi dan radio, dan permainan video. (Indra Tranggono:2014). Arsip statis dapat didayagunakan dalam pengembangan industri budaya, seperti:

1. Arsip statis digunakan sebagai sumber untuk

menelusuri keberadaan situs-situs bersejarah sehingga bisa menjadi komoditas wisata budaya

2. Arsip statis digunakan sebagai sumber penelitian yang dapat menghasilkan penemuan ilmu pengetahuan baru serta dapat menjadi sumber penerbitan
3. Arsip statis dengan sifatnya yang mempunyai nilai guna sejarah dapat diolah menjadi film-film dokumenter
4. Arsip statis dapat didayagunakan oleh institusi media massa baik televisi maupun radio untuk membuat program-program yang unik berbasis budaya dan kearifan lokal
5. Arsip statis dapat dikemas dalam suatu seni pertunjukan seperti pameran yang dapat menghasilkan nilai ekonomis

Arsip statis juga dapat menjadi sumber inspirasi menentukan kebijakan perekonomian. Mempelajari sejarah ekonomi juga penting dalam rangka membangun perekonomian. Seperti diungkapkan oleh Soegijanto Padmo (2002) bahwa kumpulan informasi tentang sejarah ekonomi masa lampau dapat menjadi sumber informasi tentang perubahan yang terjadi dalam bidang sosial dan ekonomi kehidupan masyarakat di masa

lampau. Dengan informasi tersebut dapat memberikan pengetahuan yang benar kepada kita tentang pola perubahan perekonomian masa lalu. Pengetahuan tersebut dapat menghadirkan pemahaman bahwa masa kini sebenarnya adalah kelanjutan dari masa lampau dan masa yang akan datang merupakan produk apa saja yang dilakukan saat ini. Dengan pemahaman tersebut akan diperoleh kearifan didalam melaksanakan kegiatan pembangunan dalam berbagai aspek kehidupan saat ini dengan tidak mengulang kesalahan dan kegagalan yang terjadi di masa lampau.

Langkah ini diharapkan mampu menggagas perekonomian secara visioner yang berorientasi pada kekinian dan masa depan tanpa tercabut dari masa lalunya. Meminjam istilah Florida (2003) yang diungkapkan oleh Bambang Purwanto (2012:11) *writing the past inscribing the future* “menyurat yang silam menggurat yang menjelang”, artinya upaya memaknai masa lalu untuk kehidupan kekinian dan masa depannya ditengah-tengah perubahan yang sedang terjadi. Masa lalu sebagai sejarah menjadi roh dan cahaya, yang memberi pancaran terang untuk berjalan dan meneruskan langkah

ke depan, bukan ruang gelap dimana orang harus kembali. Sejarah menjadi kaca untuk bercermin yang refleksinya menjadi dasar untuk hidup di masa kini dan merancang masa depan yang diinginkan.

Proses penyerapan data termasuk di dalamnya arsip sebagai sumber informasi menjadi pengetahuan yang selanjutnya melahirkan kebijaksanaan/kearifan menurut Stueart (2002) dalam Laksmi dkk (2011:28) disebut sebagai hierarki asimilasi informasi yang digambarkan sebagai berikut:

Gambar 1.
Hierarki Asimilasi Informasi
(Stueart:2002)



Untuk menyukseskan program pemerintah dalam mengembangkan ekonomi kreatif, sektor informasi tidak hanya dibangun dari sisi lembaga penyedia informasi saja tetapi juga perlu dibangun kecerdasan publik sebagai pengguna informasi. Supaya informasi publik dapat tersedia dengan baik

dan dapat didayagunakan secara optimal perlu dikembangkan *knowledge management* dan *information literacy*.

Knowledge management menurut Laksmi (2011:31-33) adalah disiplin yang menggunakan pendekatan terintegrasi untuk mengidentifikasi, mengumpulkan, mengevaluasi, menemukan kembali berbagai aset informasi perusahaan. Aset tersebut mencakup pangkalan data, dokumen, kebijakan, prosedur, serta keahlian dan pengalaman individu yang belum terekam dari para pekerja. *Knowledge management* meliputi *IT Expert*, *organizational learning specialist*, dan *document management specialist*. John Seely Brown and Paul Duguid (2000:117) mendefinisikan *knowledge management* sebagai berikut:

“Knowledge management is the use of technology to make information relevant and accessible wherever that information may reside. To do this effectively requires the appropriate application of the appropriate technology for the appropriate situation. Knowledge management incorporates systematic processes of finding, selecting, organizing, and presenting information in a way that

improves an employee's comprehension and use of business assets.”

Document management specialist atau ahli manajemen dokumen terkait erat dengan keberadaan lembaga informasi seperti yang disampaikan oleh Srikantaiah (2000) dalam Laksmi dkk. (2011:33-34) sebagai berikut:

“Document management specialist point to their information systems such as libraries, information centers, records center, and archives centers, and emphasize collection policies. According to them, the effectiveness of those information system relies on factors like response times, throughput, quality of information, accuracy of information, completeness of information, relevancy of information, and operating costs. Obviously, the focus of those specialists is on the explicit knowledge component”

Terkait dengan *knowledge management* setiap organisasi penting untuk menciptakan (*create*), menyimpan (*store*), menangkap (*capture*), dan membagi (*share*) pengetahuan secara efektif dan efisien agar menjadi organisasi yang kompetitif.

Information literacy/literasi informasi merupakan

kemampuan dalam bidang informasi harus dimiliki oleh tidak hanya pengelola informasi tetapi juga publik sebagai pengguna informasi. Menurut ALA (*American Librarian Association*) literasi informasi adalah kemampuan seseorang untuk menyadari adanya kebutuhan informasi, menemukan informasi, mengevaluasi dan menggunakan informasi dengan efektif. Kemampuan ini juga menjadi bagian dari proses pembelajaran independen. Dengan literasi informasi tidak hanya sekedar memahami informasi semata tetapi juga membangun makna baru dari hasil interpretasi. Kemampuan ini dibangun dari berbagai aspek seperti persepsi atau cara pandang seseorang, pengalaman, dan pendidikan. Literasi informasi sangat mempengaruhi kualitas informasi yang dihasilkan dan diperoleh seseorang. Semakin tinggi kemampuan literasi informasi seseorang maka semakin tepat, cepat, dan akurat informasi yang diperolehnya. Kemampuan literasi informasi menurut ACRL (*Association of College Research Libraries*) meliputi:

1. Kemampuan untuk mengenali informasi yang dibutuhkan;

2. Kemampuan untuk mengakses informasi;
3. Kemampuan mengevaluasi informasi;
4. Kemampuan menggunakan informasi;
5. Kemampuan memahami informasi isu-isu sosial dan ekonomi. (Laksmi, dkk., 2011:35-38).

I. PENUTUP

A. Kesimpulan

Ekonomi kreatif telah dipilih sebagai sebuah strategi dalam mengatasi kebuntuan pembangunan ekonomi Indonesia selama ini. Kebijakan ini diambil didasarkan pada berbagai alasan dengan pertimbangan potensi yang dapat dikembangkan. Salah satu alasan yang mendasar adalah pengalaman kegagalan pembangunan ekonomi yang bertumpu pada sumber daya alam. Keunggulan sistem ekonomi kreatif adalah sistem ini mengandalkan sumber daya terbarukan khususnya pada ide-ide kreatif sumber daya manusia. Indonesia sangat potensial untuk mengembangkan ekonomi kreatif karena memiliki sumber daya berupa kebudayaan dan nilai-nilai kearifan lokal yang

dapat terus dilestarikan dan dikembangkan untuk menopang perekonomian.

Berbagai program yang dapat dikembangkan untuk menopang pembangunan ekonomi kreatif antara lain mendorong industri budaya. Industri budaya dapat dikemas dalam berbagai format seperti penelitian dan pengembangan, penerbitan dan percetakan, kerajinan, perfilman, penyiaran, wisata, cagar budaya, pertunjukan, dan sebagainya. Untuk mendorong program-program tersebut dibutuhkan ide-ide kreatif dari SDM Indonesia. Ide-ide kreatif tersebut harus selalu diasah dan ditumbuhkan. Salah satu input penting untuk melahirkan ide-ide kreatif tersebut adalah sumber informasi baik informasi kekinian menyangkut gambaran peluang dan tantangan yang ada maupun informasi masa lampau yang memiliki nilai budaya sebagai sumber referensi dan inspirasi.

Arsip menjadi salah satu sumber informasi yang dapat diolah dan didayagunakan. Informasi kekinian dapat diambil dari arsip dinamis. Penyajian arsip dinamis dapat mengacu pada UU

Keterbukaan Informasi Publik. Informasi masa lampau yang sarat dengan nilai budaya dan kearifan lokal dapat diambil dari arsip statis. Pengolahan dan penyajian informasi berbasis arsip perlu dikembangkan oleh seluruh organisasi baik pemerintah maupun swasta dengan mengoptimalkan kinerja organisasi kearsipannya.

B. Saran

Dalam mengoptimalkan fungsi arsip untuk mendukung pembangunan ekonomi kreatif di Indonesia, tiga hal penting yang harus dikembangkan di bidang kearsipan adalah:

1. **Penyelenggaraan kearsipan yang kreatif dan inovatif** didasarkan pada kebutuhan dan tuntutan *stakeholders* baik itu pemerintah, swasta, maupun masyarakat umum karena arsip menjadi komoditi/sumber daya semua pihak dalam mengembangkan sektor ekonominya. Pelaku kearsipan dalam bekerja tidak hanya mengacu peraturan tetapi perlu melakukan langkah-langkah

inovatif untuk memberikan layanan prima. Keadilan dalam pemberian layanan kearsipan perlu dikedepankan, artinya kearsipan digerakkan bukan semata-mata untuk pemerintah tetapi didasari filosofi pelayanan publik seluas-luasnya.

2. Penyelenggaraan kearsipan yang tidak *infocentris* dan *egocentris* karena lembaga informasi termasuk organisasi kearsipan ada kecenderungan bersifat *infocentris*. *Infocentris* biasanya akan diikuti dengan *egosentris* yang berimbas pada ego sektoral. Jika hal ini dibiarkan berkembang dalam iklim kerja di organisasi kearsipan maka kearsipan akan berkembang menjadi bidang yang tidak berfungsi karena kurang mengakomodir kebutuhan dan tuntutan bidang lainnya. Kearsipan seharusnya mampu memfasilitasi seluruh bidang. Oleh karena itu, dalam

pengembangannya harus berorientasi pada kebutuhan para *stakeholders*/penggunanya.

3. Menumbuhkembangkan budaya literasi informasi di organisasi kearsipan untuk meningkatkan kemampuan memenuhi kebutuhan pengguna. Literasi informasi juga perlu dikembangkan di masyarakat supaya masyarakat memiliki kemampuan untuk mendayagunakan informasi yang telah disediakan oleh organisasi kearsipan.

DAFTAR PUSTAKA

- UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang *Keterbukaan Informasi Publik*.
- UU Nomor 43 Tahun 2009 tentang *Kearsipan*.
- Brown, John Seely and Paul Duguid, *The Social Life of Information*, USA: President and Fellows of Harvard College, 2000.
- Laksmi, dkk., *Manajemen Lembaga Informasi: Teori dan Praktik*, Jakarta: Penaku, 2011.
- Padmo, Soegijanto, *Bunga Rampai Sejarah Sosial-Ekonomi Indonesia*, Yogyakarta: Aditya Media Yogyakarta, 2002.

Purwanto, Bambang, *Merajut Kebhinekaan dan Kearifan Budaya bagi Kemajuan dan Kesejahteraan Indonesia*, Pidato Ilmiah Dies Natalis UGM ke-63, 2012.

Siagian, Sondang P, *Administrasi Pembangunan: Konsep, Dimensi, dan Strateginya*,. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2003.

Susanto, Astrid, *Komunikasi Kontemporer*, Jakarta: Penerbit Bina Cipta, 1977.

Tranggono, Indra, *DIY dan Tantangan Ekonomi Kreatif*. Opini pada SKH Kedaulatan Rakyat, 2014.

<http://finance.detik.com/read/2014/11/20/162558/2754401/4/hapus-kemenparekraf-jokowi-akan-bentuk-badan-ekonomi-kreatif>

<http://krjogja.com/read/187566/ki-jamin-warga-berhak-dapat-kemudahan-akses-informasi.kr>

http://id.wikipedia.org/wiki/Ekonomi_kreatif#Perkembangan_ekonomi_kreatif_di_Indonesia